

RENJA

**KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pungging Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Agustus 2021

CAMAT PUNGGING



Drs. MUJIB, MM

Pembina Tk. I

NIP 19650809 199312 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	21
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	39
BAB V Penutup	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Pungging yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Pungging adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2021 – 2026.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Kecamatan Pungging memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Renja perubahan yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Mengacu pada Rancangan Awal RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
31. SK tim penyusunan renstra Kec. Pungging Nomor 188/45/416-306/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2021-2026 dan Renja 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program

- /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil.
 4. Langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
 5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, pagu dana indikatif dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RENSTRA PD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Rankir Renja dan Rencana Tindaklanjuti Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”. Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Pungging pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran pada Kecamatan Pungging Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.790.520	27.542.849	79,17%	7.247.671
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.500.000	1.534.500	61,38%	965.500
3	Penyediaan alat tulis kantor	15.347.500	15.347.500	100%	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.785.000	2.785.000	100%	0
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.000.000	9.000.000	100%	0
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	141.600.000	140.972.000	99,56%	628.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.875.000	95,83%	125.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	25.432.500	25.432.500	100%	0
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	17.500.000	17.500.000	100%	0
10	Penyediaan Jasa tenaga Kerja	13.404.480	13.404.480	100%	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	16.750.000	16.745.000	99,97%	5.000
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	25.100.000	25.100.000	100%	0
3	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100%	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	6.700.000	6.700.000	100%	0
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan				
1	Penunjang PATEN	30.861.250	30.861.250	100%	0
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	12.500.000	12.500.000	100%	0
3	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan	17.142.500	17.142.500	100%	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
4	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	125.250.000	123.204.000	98,37%	2.046.000
5	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	50.612.500	50.612.500	100%	0
JUMLAH		553.276.250	542.259.079	98,01%	11.017.171

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

Kegiatan reviu evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C. 29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Pungging

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah sd 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5=n-3	6=n-2	7=n-2	8=(7/6)	9=n-1	10=(5+7+9) (n-1)	11=(10/4) (n-1)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentasi indikator program PD yang tercapai	80%	80%						
7.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat	10 dokumen	10 dokumen						

		tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu								
7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7 dokumen						
7.01.01.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen						
7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	18 laporan	18 laporan						
7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Ketatausahaan	28 dokumen	28 dokumen						

		dan Kepegawaian								
7.01.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	4 laporan	4 laporan						
7.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25 stel	25 stel						
7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	25 stel	25 stel						
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%						
7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll	1 paket	1 paket						

7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll	1 paket	1 paket						
7.01.01.02.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan						
7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	1 paket						
7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan						

7.01.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	1 paket						
7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan						
7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%						
7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 bulan	12 bulan	12 bulan						
7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan selama 12 bulan	1 THL	1 THL						
7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik	100%	100%						

	Daerah	Daerah yang terpelihara dengan baik								
7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya selama 12 bulan	5 unit	5 unit						
7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit						
7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	1 paket	1 paket						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan umum yang terlayani	85%	85%						

		sesuai Standart Pelayanan								
7.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	300 pelayanan	300 pelayanan						
7.01.02.02.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10 pelayanan	10 pelayanan						
7.01.02.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Nonperizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	290 pelayanan	290 pelayanan						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara an : Pemerintahan, Pembangunan,	86%	86%						

		ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat								
7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	19 fasilitasi	19 fasilitasi						
7.01.06.02.01,02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 fasilitasi	19 fasilitasi						
7.01.06.02.01,11										
7.01.06.02.01,09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi	19 fasilitasi	19 fasilitasi						

		Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
7.01.06.02.01,14	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	19 fasilitasi	19 fasilitasi						
7.01.06.02.01,12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19 fasilitasi	19 fasilitasi						

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pungging

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan
		Terwujudnya tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten

diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pungging
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	78,8	79,7	80,6	81,5	-	-	78,8	79,7	Baik
2	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	81%	82%	83%	84%	-	-	81%	82%	Baik
3	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	81%	82%	83%	84%	-	-	81%	82%	Baik

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pungging

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Pungging dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal sehingga tujuan Kecamatan Pungging dalam mendukung visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** pada misi ke tiga yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan”*** dapat terwujud dengan maksimal pula.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pungging antara lain :

1. Belum memadainya kompetensi beberapa SDM yang ada;
2. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja hingga menyebabkan tidak meratanya pembagian tugas;
3. Kurang meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis pelayanan yang dilayani oleh kecamatan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang

memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pungging	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,8	3.112.097.039	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,8	3.112.097.039	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	10.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiat an	Lokas i	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuha n Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	2.588.524.0 08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	2.588.524. 008	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokum en	2.578.524.0 08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokum en	2.578.524.0 08	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	4 lapora n	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	4 laporan	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	80	17.875.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	80	17.875.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	25 Stel	17.875.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	25 Stel	17.875.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya		Jumlah Bimtek Peningkatan Kompetensi ASN yang Dilaksanakan	2 Bimte k	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya		Jumlah Bimtek Peningkatan Kompetensi ASN yang Dilaksanakan	2 Bimtek	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	323.168.03 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai	100%	323.168.03 1	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiat an	Lokas i	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaia n	Kebutuha n Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kebutuhan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	18.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	18.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	185.168.031	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	185.168.031	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	312 bahan bacaan	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	312 bahan bacaan	10.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas,	1 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah jenis ATK yang disediakan :	1 paket	20.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiat an	Lokas i	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaia n	Kebutuha n Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tinta, ballpoint, map, dll					kertas, tinta, ballpoint, map, dll			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pemenuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pemenuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	53.430.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	53.430.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	40.025.520	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	40.025.520	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	1 THL	13.404.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	1 THL	13.404.480	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	109.100.00 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	109.100.00 0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiat an	Lokas i	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuha n Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang, dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	5 unit	47.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang, dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	5 unit	47.100.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	49.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	49.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	13.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	13.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Punggi ng	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	40.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	40.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 Pelayan an	40.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 Pelayan an	40.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiat an	Lokas i	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaia n	Kebutuha n Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10 pelayan an	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10 pelayan an	10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	290 pelayan an	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	290 pelayan an	30.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Punggi ng	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklnjuti	81%	340.000.00 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklnjuti	81%	340.000.00 0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	19 Fasilita si	340.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	19 Fasilitas i	340.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiat an	Lokas i	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaia n	Kebutuha n Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	19 Fasilita si	70.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	19 Fasilita si	70.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	19 Fasilita si	45.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	19 Fasilita si	45.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	19 Fasilita si	55.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	19 Fasilita si	55.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	19 Fasilita si	170.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	19 Fasilita si	170.000.000	
					3.492.097.039					3.492.097.039	

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2022 adalah sebagaimana tabel 2.6 (T-C. 32) berikut :

Tabel 2.6
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2022
Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Pungging

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	-	-	-	-

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pungging ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah;
- 2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	80	80,5	81	81,5	82
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63	64	65	66	67
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Pungging yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2022. Renja Kecamatan Pungging merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pungging.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pungging Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Pungging yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging untuk 5 Tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Pungging Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 serta Prakiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut :

Table 3.2 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Pungging	78,8	3.112.097.039	APBD		79,7	3.329.943.832
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target		100%	20.000.000			100%	21.400.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku		7 dokumen	10.000.000			7 dokumen	10.700.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		6 dokumen	10.000.000			6 dokumen	10.700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		100%	2.588.524.008			100%	2.769.720.689
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28 dokumen	2.578.524.008			28 dokumen	2.759.020.689
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan		4 laporan	10.000.000			4 laporan	10.700.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		80	17.875.000			80,5	19.126.250

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		25 Stel	7.875.000			25 Stel	8.426.250
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek Peningkatan Kompetensi ASN yang Dilaksanakan		2 Bimtek	10.000.000			2 Bimtek	10.700.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100%	323.168.031			100%	345.789.793
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	18.000.000			1 paket	19.260.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	185.168.031			1 paket	198.129.793
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor		12 bulan	35.000.000			12 bulan	37.450.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy		1 paket	10.000.000			1 paket	10.700.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		312 bahan bacaan	10.000.000			312 bahan bacaan	10.700.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll		1 paket	20.000.000			1 paket	21.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	45.000.000			12 bulan	48.150.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	53.430.000			100%	57.170.100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	40.025.520			12 bulan	42.827.306
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan		1 THL	13.404.480			1 THL	14.342.794
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	109.100.000			100%	116.737.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku		5 unit	47.100.000			5 unit	50.397.000

	Operasional atau Lapangan	cadang, dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan						
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		2 unit	49.000.000		2 unit	52.430.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 paket	13.000.000		1 paket	13.910.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	Ke c. Pu ng gin g	81%	40.000.000	APB D	82%	45.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		300 Pelaya nan	40.000.000		300 Pelaya nan	45.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		10 pelaya nan	10.000.000		10 pelaya nan	12.900.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		290 pelaya nan	30.000.000		290 pelaya nan	32.100.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Ke c. Pu ng gin g	81%	340.000.000	APB D	82%	360.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat		19 Fasilit asi	340.000.000		19 Fasilit asi	360.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		19 Fasilit asi	70.000.000		19 Fasilit asi	71.100.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		19 Fasilit asi	45.000.000		19 Fasilit asi	48.150.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		19 Fasilit asi	55.000.000		19 Fasilit asi	58.850.000

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan		19 Fasilitasi	170.000.000			19 Fasilitasi	181.900.000
					3.492.097.039				3.734.943.832

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas

pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA SKPD : KECAMATAN PUNGGING

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/ L	INDIKATOR KINERJA			LOK AS I	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTP UT	OUTCOME	TAR GE T			SKP D Ter k ait	Pag u (Rp)	K L	Rp .	D / T B / DA K
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	-	B	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		78,8	Kec. Pung ging	3.112.097.039	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target		100 %	Kec. Pung ging	20.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		7 doku men	Kec. Punggi ng	10.000.000	-	0	-	0	-

	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		6 dokumen	Kec. Pungging	10.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		100 %	Kec. Pungging	2.588.524.00					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan		28 dokumen	Kec. Pungging	2.578.524.00	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		L	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan		4 laporan	Kec. Pungging	10.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	IP ASN Perangkat Daerah		80	Kec. Pungging	17.875.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		L	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		25 Stel	Kec. Pungging	7.875.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		L	Jumlah Bimtek Peningkatan Kompetensi ASN yang Dilaksanakan		2 Bimtek	Kec. Pungging	10.000.000	-	0	-	0	-

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100%	Kec. Pungging	323.168.031	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 paket	Kec. Pungging	18.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.		1 paket	Kec. Pungging	185.168.031	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor		L	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor		12 bulan	Kec. Pungging	35.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi		1 paket	Kec. Pungging	10.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		312 bahan bacaan	Kec. Pungging	10.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material		1 paket	Kec. Pungging	20.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas		12 bulan	Kec. Pungging	45.000.000	-	0	-	0	-

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Kec. Pungging	53.430.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	Kec. Pungging	40.025.520	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan		1 THL	Kec. Pungging	13.404.480	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	Kec. Pungging	109.100.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		L	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun		5 unit	Kec. Pungging	47.100.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		2 unit	Kec. Pungging	49.000.000	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 paket	Kec. Pungging	13.000.000					
2	7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		L	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		81%	Kec. Pungging	40.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		300 Pelayanan	Kec. Pungging	40.000.000	-	0	-	0	-

	7.01.03	Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan Non Usaha		L	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		10 pelayanan	Kec. Pungging	10.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		L	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		290 pelayanan	Kec. Pungging	30.000.000	-	0	-	0	-
3		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		81%	Kec. Pungging	340.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		19 Fasilitasi	Kec. Pungging	340.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		19 Fasilitasi	Kec. Pungging	70.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		19 Fasilitasi	Kec. Pungging	45.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		19 Fasilitasi	Kec. Pungging	55.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		19 Fasilitasi	Kec. Pungging	170.000.000	-	0	-	0	-
JUMLAH									3.492.097.039					

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2021)

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pungging, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Trowulan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

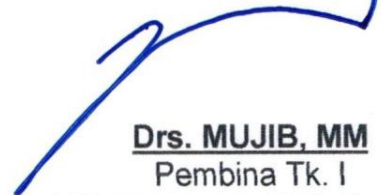
5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Pungging diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua

pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

CAMAT PUNGGING



Drs. MUJIB, MM
Pembina Tk. I
NIP 19650809 199312 1 001